



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan semakin tinggi, oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdorong untuk menerapkan dan meningkatkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo 2006 dalam Roshanti 2014). Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan.

Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas adalah dengan menyusun dan menerbitkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Masyarakat yang berperan sebagai pengguna layanan publik serta penghasil pendapatan tertinggi dalam anggaran negara dalam bentuk pajak membutuhkan laporan keuangan untuk mengevaluasi dan menganalisa pengalokasian sumber daya yang dikelola. Pihak yang melakukan kerjasama dengan pemerintah seperti investor dan *vendor* juga membutuhkan laporan keuangan pemerintah untuk memastikan kemampuan dan

kelancaran pembayaran atas pengadaan barang dan jasa yang diberikan. Pihak pemeriksa laporan keuangan pemerintah seperti BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) membutuhkan hasil laporan keuangan pemerintah untuk diberi penilaian atas kewajaran dan kelayakan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah. Penilaian yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan terdiri dari empat opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini.

Dalam penelitian ini, Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang menjadi objek penelitian telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama enam tahun berturut-turut mulai dari tahun 2009 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut secara langsung diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung kepada Ketua DPRD Kota Bandar Lampung dan Walikota Bandar Lampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandar Lampung telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang relevan adalah laporan yang memenuhi aspek kesesuaian dengan SAP, ketepatan waktu, kelengkapan, bisa digunakan sebagai alat prediksi serta bisa digunakan untuk mengoreksi keputusan. Keandalan laporan keuangan meliputi aspek kejujuran pencatatan transaksi, terbebas dari salah pengertian dan kesalahan materi, dapat

memenuhi kebutuhan pengguna serta tidak berpihak pada satu pihak. Indikator laporan keuangan pemerintah yang dapat dibandingkan adalah laporan yang bisa dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya dan menggunakan kebijakan SAP yang sama dari waktu ke waktu. Laporan keuangan yang dapat dipahami adalah laporan yang disusun secara sistematis dan disajikan sesuai dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah pusat menerbitkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) menyangkut pengelolaan keuangan daerah diantaranya, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah (PEMDA) sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah diharuskan untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Seperti yang tertera pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur tentang pelayanan publik menjelaskan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dimaksud harus dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan disusun berdasarkan SAP. Dalam menyajikan laporan keuangan, pemerintah harus bisa memberikan nilai informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan aspek aspek seperti, penggunaan teknologi, penggunaan sistem informasi, dan pengendalian internal supaya bisa menghasilkan laporan keuangan yang bisa diandalkan.

Laporan keuangan merupakan salah satu cara bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam melihat dan menilai akuntabilitas yang diterapkan pemerintahan. Laporan keuangan merupakan sarana utama dalam mengkomunikasikan informasi keuangan utama kepada pihak- pihak korporasi dan pihak luar (Kieso, 2011). Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak- pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan, oleh karena itu informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan harus bernilai supaya bisa bermanfaat bagi pengguna. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah laporan yang mengandung informasi yang bernilai serta memenuhi persyaratan normatif yang diwajibkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sehingga laporan tersebut dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan terutama bagi para pemangku jabatan dalam pengambilan keputusan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal dalam pemerintahan di era globalisasi ini sangat diharapkan masyarakat dan pemegang kepentingan lainnya demi tercapainya tujuan-tujuan negara dengan lebih efisien. Dengan kemajuan teknologi yang dapat membantu kinerja pemerintahan, pemerintah pusat memaksimalkan pemerataan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah daerah supaya komunikasi dan penyebaran informasi menjadi lebih maksimal. Oleh karena itu, badan-badan pemerintahan yang belum menerapkan teknologi harus melakukan alih teknologi. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. Pemanfaatan teknologi dalam kantor satuan kerja perangkat daerah yang meliputi penggunaan perangkat komputer dan aplikasi yang sesuai peraturan, proses dan pelaporan hasil informasi secara terkomputerisasi, penjadwalan perawatan komputer, serta penggunaan jaringan internet dapat membantu mempercepat waktu proses penyusunan, meminimalisir kesalahan, serta menyimpan data keuangan secara keseluruhan, sehingga dapat membantu para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Soimah, 2014). Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi persyaratan normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, sehingga nilai informasi

yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut semakin berkualitas dan dapat digunakan oleh pihak pemakai terutama para pemangku jabatan dalam menentukan keputusan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, SIKD ditetapkan untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum, struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No 13, 2006). Penerapan

SIPKD atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat meningkatkan kualitas keamanan akses data, kecepatan waktu akses atas data dan informasi, ketelitian, variasi *output*, kesesuaian atau relevansi serta ketelitian, sehingga dapat membantu para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan menyusun laporan keuangan yang memenuhi persyaratan-persyaratan normatif seperti yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Dewi, 2014). Sehingga nilai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang disusun menjadi lebih berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh pihak pengguna terutama para pemangku jabatan dalam proses pengambilan keputusan.

Seiring berjalannya aktivitas pemerintahan dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki, para atasan dan pemimpin daerah melakukan pengendalian internal terhadap pegawai dari setiap struktur organisasi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keberlangsungan jalannya aktivitas internal tiap divisi dalam melakukan tugas masing-masing dan mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara Pengawasan Intern adalah seluruh proses

kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penerapan sistem pengendalian intern pada kantor pemerintahan dapat membantu meningkatkan lingkungan pengendalian (etika, kewenangan, dan pembagian tugas), penilaian resiko, aktivitas pengendalian, komunikasi, serta pemantauan, sehingga para pegawai dapat dengan lebih terarah dalam menyelesaikan pekerjaan dan menyusun laporan keuangan yang memenuhi persyaratan normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, sehingga nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut lebih berkualitas dan dapat digunakan pihak pemakai terutama para pemangku jabatan untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan (Sudiarianti, 2013).

Pihak-pihak pengguna laporan keuangan pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak eksternal meliputi masyarakat, pihak yang menjalin kerja sama dengan pemerintah (*vendor* dan investor), serta pihak pemeriksa resmi seperti BPKRI atau Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Para pengguna laporan keuangan tersebut menjadikan nilai informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan mereka. Oleh sebab itu, pemerintah harus memperhatikan aspek-aspek yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu pemanfaatan teknologi informasi,

penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan sistem pengendalian internal dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Surastianti (2015) yang memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penambahan variabel independen yaitu penerapan sistem informasi pengelola keuangan yang mengacu pada penelitian Evicahyani (2016)
2. Objek yang digunakan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kota Bandar Lampung. Penelitian sebelumnya adalah SKPD di Kota Salatiga.
3. Kuesioner yang digunakan mengacu pada kuesioner milik Sudiarianti (2013), Soimah (2014), Dewi (2014).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” (Studi Empiris Pada SKPD Kota Bandar Lampung).**

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi dalam penelitian ini menggunakan 3 faktor, yaitu pemanfaatan

teknologi informasi, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan sistem pengendalian intern.

2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandar Lampung. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan, dan menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.
3. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor SKPD, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan positif bagi kantor SKPD Kota Bandar Lampung dalam melakukan kegiatan operasional pemerintahan yang didukung dengan penerapan teknologi serta sistem informasi yang dijalankan oleh pegawai, sehingga laporan keuangan yang disusun bisa menjadi lebih berkualitas dan bisa membantu dalam pengambilan keputusan.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengaruh kompetensi pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
3. Bagi peneliti, dijadikan sebagai pembelajaran dalam menganalisis dan memperdalam pengetahuan tentang karakteristik dan susunan organisasi

pemerintahan serta penyampaian informasi laporan keuangan pemerintah, pemanfaatan teknologi yang diterapkan pemerintah, penerapan sistem informasi pemerintahan, serta sistem pengendalian internal yang diterapkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan referensi dan acuan untuk melakukan penelitian serupa yang mengkaji ruang lingkup lebih luas serta variabel penelitian yang lebih beragam.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan terdiri dari atas lima bab, masing-masing berisi uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri atas penjelasan pembahasan secara rinci terkait organisasi sektor publik dan pemerintah daerah. Teori mengenai laporan keuangan pemerintah daerah, teknologi informasi, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern yang di dalamnya terdapat indikator pengukuran masing-masing variabel independen dan pengaruhnya terhadap variabel dependen, serta pengembangan hipotesis dan model penelitian. Pada

bab ini juga terdapat rumusan hipotesis penelitian dan model penelitian untuk menguatkan hasil penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, unit analisis yang digunakan, populasi dan sampel yang dipakai, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV: ANALIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari objek penelitian, deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini terdiri atas simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

UMMN